

ABSTRAK

kebijakan Indonesia dalam memberantas pembajakan kapal di Perairan Natuna berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Perairan Natuna, yang memiliki posisi strategis dan kaya sumber daya alam, sering menjadi target pembajakan dan kejahatan maritim lainnya. Pembajakan kapal tidak hanya mengancam keamanan maritim Indonesia tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan diplomatik. Dalam konteks ini, ACCT berfungsi sebagai kerangka kerja sama regional yang bertujuan mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, termasuk pembajakan kapal sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas. Bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam menanggulangi pembajakan kapal di Perairan Natuna serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan ACCT.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mencakup penguatan penegakan hukum maritim, peningkatan patroli keamanan, dan kerja sama internasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan sengketa wilayah masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka kerja regional seperti ACCT untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pembajakan kapal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan keamanan maritim di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Indonesia, kebijakan, pembajakan kapal, Natuna, ASEAN Convention on Counter Terrorism, keamanan maritim, kerjasama internasional.

ABSTRACTS

Indonesia's policy in eradicating ship piracy in Natuna waters is based on the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Natuna waters, which have a strategic position and are rich in natural resources, are often the target of piracy and other maritime crimes. Ship hijacking not only threatens Indonesia's maritime security but also has economic and diplomatic impacts. In this context, ACCT functions as a regional cooperation framework aimed at preventing and overcoming the threat of terrorism, including ship hijacking as a form of cross-border crime. Aims to analyze the steps that have been taken by Indonesia to tackle ship piracy in Natuna waters and assess the suitability of these policies with ACCT provisions.

The research method used is normative juridical with a statutory approach and case analysis. The research results show that Indonesia has adopted various policies which include strengthening maritime law enforcement, increasing security patrols, and international cooperation. However, challenges such as limited resources and territorial disputes still pose obstacles to policy implementation.

This research emphasizes the importance of synergy between national policies and regional frameworks such as ACCT to increase the effectiveness of eradicating ship piracy. It is hoped that this research can contribute to the development of maritime security policies in Indonesia and the Southeast Asia region.

Keywords: *Indonesia, policy, ship hijacking, Natuna, ASEAN Convention on Countering Terrorism, maritime security, international cooperation.*